

**POLITIK MULTIKULTURAL ETNIS TIONGHOA  
PASCA-REFORMASI DI KOTA MEDAN  
(MULTICULTURAL POLITICS OF CHINESE  
AT POST-REFORM IN MEDAN)**

**Deny Setiawan**  
Universitas Negeri Medan  
Email: geodeny@ymail.com

**Abstract**

*This research purposed to get a factual description about multicultural politics of Chinese at post-reform in Medan. Factuality multicultural politics explored through the perspective of Chinese leaders thinking about the themes reconceptualization of integration and reconstruction of national identity. Empirical data of the two themes, used as input in the development of a multicultural society project in Medan. Collection of data was performed by assessment techniques documentation, observation and interviews. Data analysis using analytic comparison that in the data processing included in the method of agreement and method of difference. The research findings indicate (1) the perspective thinking of the Chinese leaders in reconceptualization of integration leads to the choice of "integrated-pluralism" as a policy that is considered more appropriate in establishing the post-reform integration in Medan, (2) ideas, demands and expectations of the Chinese leaders about the reconstruction of national identity formulations produce a national identity that is more fitting for Indonesia in the era of globalization, the "hybrid identity". This formulation describes the Indonesian identity continues to be fluid and dynamic, and (3) the synergy of these two themes show has been a shift from cultural pluralism to multiculturalism that in the arrangement still requires time and a more conducive atmosphere.*

**مستخلص**

تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على نظرة عامة واقعية لسياسات متعددة الثقافات في مرحلة ما بعد الإصلاح العرقية الصينية في ميدان. حقائق السياسة المتعددة الثقافات استكشافها من خلال وجهة نظر القادة الصينيين حول موضوعات التكامل ومفاهيمها إعادة بناء الهوية الوطنية. البيانات التجريبية من هذين الموضوعين، وتستخدم كمدخل في تطوير مشاريع مجتمع

متعدد الثقافات في ميدان. وقد تم جمع البيانات باستخدام اسنعراض الوثائق والملاحظة والمقابلات. تحليل البيانات باستخدام المقارنة التحليلية أنه إذا تضمنت البيانات طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف. نتائج الدراسة تشير إلى (1) وجهة نظر القادة الصينيين العرقيين في مفهوم التكامل يؤدي إلى اختيار "التعددية المتكاملة" كسياسة التي تعتبر أكثر ملائمة في بناء التكامل في مرحلة ما بعد الإصلاح في ميدان، (2) الأفكار والمطالب والتوقعات لل زعماء الجالية الصينية حول إعادة بناء تركيبات الهوية الوطنية تنتج الهوية الوطنية التي هي أكثر ملاءمة لاندونيسيا في عصر العولمة "هوية هجينة". يصف هذه الصيغة لا تزال هوية الإندونيسية أن يكون، والسوائل الحيوية، و (3) تضافر هذين الموضوعين تشير كان هناك تحول من حياة إلى التعددية الثقافية مرحلة التعددية الثقافية أن الترتيب لا يزال يتطلب وقتا وأجواء أكثر ملاءمة.

*Keywords:* multicultural politics, integration, identity

## A. Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya merupakan gerak pembaharuan atas perubahan yang terencana yang dilakukan secara sengaja dalam tempo yang ditentukan secara bertahap. Dalam konteks Indonesia, istilah pembangunan sering diartikan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat, yang semenjak lahirnya orde baru direalisasikan dalam bentuk REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan terus berlangsung pada era reformasi saat ini dalam bentuk PROPENAS (Program Pembangunan Nasional). Namun hal umum yang sering terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tujuan pembangunan yang muaranya adalah kesejahteraan, justru masih banyak diwarnai oleh berbagai masalah. Model pembangunan pemerintah semasa orde baru yang bersifat *uniform* dan *top-down*, telah menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pembangunan di Indonesia mengalami persoalan ketika bidang ekonomi yang diletakkan sebagai prioritas utama, berdampak tidak hanya mempengaruhi penataan infrastruktur, tetapi juga struktur serta suprastruktur yang menyangkut ide

multikulturalisme.<sup>1</sup> Berbagai kajian pembangunan di Indonesia menunjukkan, perbedaan-perbedaan etnis telah dikesampingkan karena dianggap sebagai faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi yang sah bagi orde baru.

Kini salah satu persoalan mendesak berkaitan dengan masalah pembangunan di era reformasi adalah upaya mengintegrasikan perbedaan-perbedaan etnis tersebut dalam bingkai multikulturalisme. Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga secara sederhana negara-bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Pasca-reformasi, realitas multikultural tersebut dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi *integrating force* yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya.<sup>2</sup>

Ide multikulturalisme menjadi sesuatu yang tak terbantahkan berkaitan dengan fakta mosaiknya Indonesia sebagai nusantara beserta atribut multikultur yang melekat padanya. Namun ide dan praktik multikulturalisme mendapat tantangan terberat pada saat jatuhnya rezim orde baru, seiring memasuki era reformasi yang mengidamkan terwujudnya kehidupan demokratis. Harapan terwujudnya masyarakat multikultural yang demokratis, pada awal reformasi justru tercoreng oleh suatu tragedi kemanusiaan yang merusak citra bangsa. Dalam tragedi tersebut, salah satu dari mereka yang menjadi korban (di-korban-kan) adalah mereka yang selama ini kita golongkan sebagai non-pribumi, yaitu minoritas etnis Tionghoa. Reformasi yang selayaknya adalah suatu gerakan pembaharuan justru diwarnai oleh semacam tumpahan dendam, yaitu dendam terhadap rezim yang selama 32 tahun mengukung kebebasan hingga menjaral pada dendam terhadap etnis Tionghoa yang selama ini dianggap diistimewakan.

Dimulai dari masa kolonial melalui politik *divide et impera*, segregasi dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini memang telah diciptakan. Berlanjut

---

Abdullah, Iwan. "Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan". dalam *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, Vol. II, No. 1, April 2006, hal. 5.

<sup>2</sup> Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikulturalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 88.

pada masa orde lama hingga orde baru, yang justru melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan rezim, telah mengentalkan segregasi dan diskriminasi hingga melestarikan *prejudice* atau prasangka dan *stereotype* pada tataran *private space*. Fakta sejarah ini merupakan salah satu masalah terkendalanya integrasi dalam proses pembentukan identitas bangsa, malah merupakan *contraditio in terminis* dari konsep Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*). Untuk itu di alam reformasi, masalah integrasi dan identitas bangsa, masih merupakan suatu tema urgen untuk dikaji sebagai input dalam mendukung agenda reformasi. Tema integrasi dan identitas bangsa pasca-reformasi masih perlu banyak kajian mendalam guna mencari gagasan dan model yang pas dalam mendukung upaya pembangunan masyarakat multikultural.

Pemikiran ini menjadi gagasan awal peneliti untuk mengkaji hubungan antar etnis, khususnya antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lainnya di Kota Medan dalam kaitannya dengan konseptualisasi integrasi dan formulasi identitas bangsa. Kedua konsep tersebut perlu dikaji ulang melalui dialog dengan beberapa tokoh etnis Tionghoa, guna menghasilkan konstruksi integrasi pasca-reformasi dan formulasi identitas bangsa di era globalisasi, sebagai masukan, model dan kebijakan dalam memproyeksikan pembangunan masyarakat multikultural untuk kota Medan.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik dengan metode *grounded theory*. Metode ini memberikan peluang yang sangat besar untuk menemukan teori baru, disusun dan dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan berpegang pada suatu kajian dan hal-hal yang terkait dengan kajian tersebut.<sup>3</sup> Sesuai dengan pendekatan dan metode

---

<sup>3</sup> Strauss, A dan Corbin, J. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 10-11.

yang ditetapkan, penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi: studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dengan demikian, dalam penelitian naturalistik ini, peneliti berperan sekaligus sebagai instrumen (*human instrument*) pengumpul data.<sup>4</sup>

## 2. Penentuan Subjek Penelitian

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, yakni latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*events*), dan proses (*process*).<sup>5</sup> Berdasarkan kriteria ini, penetapan subjek penelitian secara purposif ditujukan pada tokoh etnis Tionghoa Medan, yang berarti: kriteria latar (*setting*) dalam penelitian ini adalah situasi Kota Medan pasca-reformasi 1998 sebagai tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dilakukan secara formal maupun informal, baik di lingkungan kantor, lembaga/organisasi, di rumah, atau di tempat lainnya. Sedangkan kriteria pelaku (*actors*) dalam penelitian ini adalah para tokoh etnis Tionghoa yang mempunyai peran yang besar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan observasi yang cermat, peneliti memfokuskan pemilihan subjek penelitian pada tahap *continuous adjustment* atau *focusing* pada beberapa orang yang dianggap kompeten, yang kemudian ditetapkan sebagai subjek penelitian terfokus.<sup>6</sup> Selanjutnya mengenai peristiwa (*events*) sebagai kriteria ketiga adalah perspektif pemikiran dari para subjek penelitian terfokus mengenai pandangan dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara proses (*process*) sebagai kriteria keempat adalah proses wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian terfokus berkenaan dengan perspektif pemikirannya mengenai rekonseptualisasi integrasi dan rekonstruksi identitas bangsa pasca-reformasi.

---

<sup>4</sup> Bogdan, R.C dan Biklen, S.K.. *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. (Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc1982), hal. 27

<sup>5</sup> Miles, M. B dan Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UNI Press. 1984), hal. 38.

<sup>6</sup> Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. *Naturalistik Inquiry*. (Beverly Hills: Sage Publications. 1985), hal. 202.

### 3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analytic comparison*. Menurut Neuman, *analytic comparison* dapat digunakan untuk analisis kualitatif. *Analytic comparison* di dalam penggunaannya mencakup *method of agreement* dan *method of difference*.<sup>7</sup> Guna keperluan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cakupan tersebut dalam menganalisis data. Melalui *method of agreement* dan *method of difference*, peneliti memilah pernyataan-pernyataan yang sama dan yang berbeda dari para informan, membandingkannya dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Rekonseptualisasi Integrasi

Para tokoh etnis Tionghoa di kota Medan yang tampil dalam penelitian ini, memiliki perspektif pemikiran yang berbeda berkenaan dengan tema yang pertama “rekonseptualisasi integrasi”. Pasca orde baru telah memunculkan kembali wacana asimilasi versus integrasi. Versus ini bukan dimaksudkan untuk memilih, namun yang terpenting mengkaji ulang dan melakukan konstruksi yang pas bagi integrasi bangsa ini.

Ada perbedaan gagasan dari para tokoh etnis Tionghoa dalam merekonseptualisasi integrasi, namun secara general, perspektif pemikiran tersebut mempunyai kesamaan yaitu menempatkan Persatuan Indonesia sebagai tujuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sinergi dari gagasan-gagasan yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi, telah menghasilkan suatu konsep integrasi yang lebih pas bagi Indonesia pasca-reformasi. Konsep itu diusulkan dengan nama “*integrated-pluralism*”, suatu konsep “keberagaman yang disatukan atas dasar penghargaan terhadap keberbedaan”.

Gagasan *integrated-pluralism* sebagai suatu kebijakan yang merupakan sinergis dari beberapa model (asimilasi alamiah, strategi integrasi, integrasi-asimilasi, integrasi budaya, persatuan Indonesia, dan multikulturalisme),

---

<sup>7</sup> Neuman, W. L. *Social Reserch Methods Qualitative and Quantitative Approachal*. (Boston: Allyn Bacon. 1997), hal. 427.

menunjukkan di kalangan etnis Tionghoa sendiri telah tumbuh realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan idenitas etnis Tionghoa yang plural. Untuk itu integrasi yang koeksistensi (pluralisme budaya) dalam koridor *integrated pluralism* merupakan strategi yang paling dibutuhkan bagi Indonesia yang *polyethnic* ini.

Beberapa perspektif pemikiran; gagasan, tuntutan dan harapan, dari para tokoh etnis Tionghoa dapat menjadi masukan berarti bagi negara dan pemerintah kota dalam merumuskan ulang kebijakan yang pernah ada. Perspektif pemikiran dari para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan tema "rekonseptualisasi integrasi" dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, integrasi yang dibutuhkan bagi masyarakat pasca-reformasi sepatutnya diterapkan melalui model asimilasi alamiah, sebagai kebijakan koeksistensi yang dapat mengayomi seluruh identitas budaya yang begitu beragam dan berbeda-beda. Melalui model ini, dibelajarkan perilaku mau memahami dan menerima keberagaman dan perbedaan etnis yang ada, sikap saling menghargai, solidaritas di semua lingkup kehidupan, dan *senses of belonging* terhadap semua identitas yang ada sebagai milik bangsa Indonesia. Konsep asimilasi alamiah dalam penerapannya tetap memerlukan rekayasa. Program rekayasa tetap dirancang untuk mengeliminir prasangka-prasangka rasial, mendekonstruksi nilai-nilai stereotipik, dan perilaku diskriminatif. Jelasnya rekayasa itu tetap dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan model ini menuntut "penghapusan diskriminasi". Oleh karenanya, *action* sebagai metode yang dianggap paling ampuh dalam membelajarkan pluralisme, hendaknya diiring dengan contoh dan tauladan sehingga diskriminasi yang telah menjadi penyakit kronis secara bertahap dapat terkikis dalam membangun integrasi. Kontribusi dari tuntutan ini, akan membawa harapan akan terwujudnya "masyarakat yang anti diskriminasi". Model ini menghendaki integrasi bangsa yang dibangun bukan sekedar datang dari atas oleh negara, bukan lagi jenis integrasi bangsa yang dibangun dengan paksaan dan kekerasan maupun kesadaran palsu, melainkan jenis kesadaran yang dibangun oleh integrasi bangsa dari bawah oleh masyarakat (*popular nations integration*) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masa kini dan mendatang.

*Kedua*, strategi integrasi (integrasionis) yang pernah digagas pada masa lalu, nampaknya perlu disesuaikan dengan alam di era reformasi ini. Integrasi yang wajar, yang nonras, yang mengakui semua suku yang ada di Nusantara sebagai bagian dari bangsa Indonesia, termasuk suku peranakan Tionghoa. Untuk tercapainya integrasi yang wajar, seluruh anggota masyarakat berinteraksi secara terbuka saling mengisi kebutuhan, tidak saling merintang, dan yang penting ada konsensus, yaitu konsensus terhadap konsep bangsa Indonesia yang lebih modern. Konsep *nation* Indonesia yang tidak lagi berbau ras, tetapi konsep *nation* Indonesia yang ditempatkan dalam batasan arti politik, bahwa warga negara Indonesia sejati dilihat bukan dari keturunannya. Tuntutan ini membawa pada harapan, semua suku-suku yang ada di Nusantara bersatu-padu, berintegrasi membangun Indonesia yang satu.

*Ketiga*, memadukan strategi integrasi dengan asimilasi secara bersamaan, merupakan gagasan alternatif yang bisa menjadi masukan. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dilihat melalui pendekatan integrasi, dalam arti sebagai strategi yang mengharuskan semua suku yang ada masuk ke dalam *mainstream* bangsa Indonesia. Namun integrasi itu harus bersifat fungsional, yaitu penyatupaduan yang didasari dengan adanya saling bergantung antara bagian-bagian dalam suatu sistem sosial untuk mewujudkan penyatuan yang harmoni. Suku-suku yang ada di Nusantara secara natural berhubungan dan bergabung membentuk sebuah kelompok yang baru, yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Integrasi yang diusulkan bersifat fungsional, dan asimilasi yang dipilih dengan jenis amalgamasi. Tuntutan dari jenis model ini menghendaki dihindarinya tindakan-tindakan yang bersifat hegemonik. Melalui tuntutan yang demikian, diharapkan terbangun Indonesia yang demokratis dan bersih dari segala bentuk diskriminasi, kemiskinan, korupsi, kebodohan, dan ketidakadilan.

*Keempat*, gagasan mengangkat integrasi budaya untuk dikonstruksi dalam membangun integrasi bangsa, menjadi gagasan alternatif berikutnya. Alasannya, secara hukum dan politik, sudah ada kesepakatan integrasi bangsa dibangun atas dasar persamaan dan kesederajatan. Tapi secara budaya, terutama pada kehidupan masyarakat, belum terjadi kesepakatan secara menyeluruh. Mungkin ini akibat pengaruh hukum dan politik kolonial yang sudah mengakar



lama, dampaknya nilai-nilai yang berlaku pada masing-masing kelompok dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan pertentangan. Gagasan membangun integrasi budaya, diperjuangkan untuk mengangkat ketidakadilan yang masih tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perjuangan dalam menghapus ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah hasil dari konstruksi sosial-budaya, yang mengakibatkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan marjinal. Ada semacam benang biru, perjuangan dalam gender identik dengan perjuangan dalam membangun integrasi budaya. Perjuangan untuk gender adalah untuk membangun budaya, yaitu budaya yang mau menerima dan menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Tidak perlu lagi membeda-bedakan, karena semua punya hak yang sama tanpa melihat darimana asal-usulnya. Harapan yang diperjuangkan dalam membangun integrasi budaya, yakni integrasi atas dasar persamaan hak dan kesederajatan.

*Kelima*, menolak istilah integrasionis dan asimilasionis, karena dua istilah itu sudah cacat secara politik, menjadi latar belakang gagasan dalam menelorkan istilah Persatuan Indonesia yang dipandang pas lebih mengindonesia. Strategi konsep Persatuan Indonesia, tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya bersatu tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing-masing komponen masyarakat. Jadi konsep itu jelas tidak berdasarkan ras, tapi yang ada adalah *nation* Indonesia. *Nation* Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama untuk mewujudkan Persatuan Indonesia. Konsep integrasi yaitu konsep menjadi warga negara dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya tanpa menghilangkan identitas budaya dan suku dari masing masing komponen masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa. Konsep Integrasi yang diperjuangkan seperti ini sangat identik dengan teori pluralisme atau multikulturalisme. Namun keidentikan konsep Persatuan Indonesia dengan multikulturalisme, menjadi berbeda, karena konsep Persatuan Indonesia dibangun berdasarkan *geist*-nya Indonesia, yang berbeda dengan konsep multikulturalime yang berasal dari *geist*-nya Barat. Konsep Persatuan Indonesia

yang diidamkan akan terwujud, jika didukung oleh kekuatan ekonomi yang mantap. Untuk itu, model ini menuntut upaya meminimalisir kesenjangan dengan harapan dapat membawa kepada Persatuan Indonesia yang *welfare*, yang sejahtera.

*Keenam*, integrasi dikonstruksi bukan berdasarkan etnisitas dan agama, tetapi dibangun berdasarkan konsensus politik atas dasar perbedaan dan penghargaan (*politics of recognition*). Kemajemukan bangsa ini, sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme bukan pluralisme. Selama ini rakyat hanya diajak untuk belajar tentang keberagaman, namun perbedaan dan penghargaan atas budaya orang lain belum dibelajarkan sampai ke akar rumput. Rakyat hanya diajak untuk menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, tetapi pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya orang lain belum dijadikan *trend*. Pandangan ini menunjukkan integrasi bangsa sudah saatnya ditempatkan dalam bingkai multikulturalisme. Harapan untuk terciptanya masyarakat multikultural yang demokratis, menuntut upaya penghapusan kebodohan melalui usaha membangun sikap multikultural.

Perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa secara keseluruhan dapat diringkas seperti pada tabel berikut:

Tokoh	Rekonseptualisasi Integrasi		
	Gagasan	Tuntutan	Harapan
1	Asimilasi Alamiah	Menghapus diskriminasi	Masyarakat anti diskriminasi
2	Strategi Integrasi	Menghapus Rasialisme	Nasionalisme Indonesia
3	Integrasi-Asimilasi	Menghapus Hegemonisme	Demokrasi Indonesia
4	Integrasi budaya	Menghapus ketidakadilan	Persamaan hak & kesetaraan
5	Persatuan Indonesia	Menghapus kesenjangan	Indonesia Sejahtera
6	Multikulturalisme	Menghapus kebodohan	Masyarakat multikultur yang demokratis

Tabel di atas, menggambarkan secara faktual rekonseptualisasi integrasi dari perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa mengarah pada pilihan *integrated-pluralism*, sebagai model yang dipandang pas dalam mendukung

pembangunan masyarakat multikultural di era reformasi. Integrasi yang dibutuhkan bagi bangsa Indonesia adalah integrasi yang dapat mengakomodir koeksistensi (pluralisme-budaya) guna mendorong pelestarian diversikasi etnik dan rasial serta memperlakukan semua kategori penduduk secara setara.<sup>8</sup> Integrasi diartikan sebagai situasi yang memberikan peluang berpartisipasi dengan bebas di dalam semua bentuk interaksi sosial (baik pada tingkat primer maupun dalam tingkat sekunder), tanpa mempermasalahkan etnisitas seseorang.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan apresiasi pluralitas, maka integrasi dalam konteks ke-Indonesia-an harus ditempatkan dalam koridor *integrated-pluralism*.<sup>10</sup> Dengan konsep ini, integrasi tidak selamanya menghilangkan deferensiasi karena yang terpenting di sana adalah memelihara kesadaran dalam menjaga keseimbangan hubungan. Dengan demikian eksistensi dan identitas masing-masing kelompok sosial yang terintegrasi tetap diakui.<sup>11</sup> Integrasi dalam koridor *integrated pluralism*, berarti integrasi yang mengakui dan memberi penghormatan pada setiap entitas identitas.

## 2. Rekonstruksi Identitas Bangsa

Pandangan dan gagasan para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan tema yang kedua “rekonstruksi identitas bangsa” juga berbeda-beda. Namun perbedaan hanya terletak pada alur berpikir bukan pada hal yang prinsip, karena masing-masing tokoh tetap pada satu muara yaitu bangsa Indonesia. Pengakuan akan posisi identitasnya sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Indonesia, sekaligus membawa identitasnya (*communitarian culture*) untuk dapat

---

<sup>8</sup> Lihat makalah Habib, A. “Dinamika Hubungan Etnis Tionghoa dengan Jawa”. Disampaikan dalam *Seminar Sinologi*. Tanggal 13-14 Maret 2006. (Malang: Lembaga Kebudayaan UMM, 2006).

<sup>9</sup> Marger, M.N. *Race and Ethnic Relation (American and Global Perspektif)*. (Belmont, California: Wadworth Inc., 1985), hal. 72.

<sup>10</sup> Besar, A. “Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi”. Disampaikan dalam *Seminar Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi*. Tanggal 16-17 November 1994. (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1994).

<sup>11</sup> Usman, S. “Integrasi dan Ketahanan Nasional Indonesia. Dalam Ichlasul Amal dan Armaid Armawi, *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 80.

menempatkan diri secara harmoni dalam suatu identitas yang lebih besar, yaitu identitas kebangsaan Indonesia (*political culture*).

Beberapa model identitas yang diusulkan para tokoh etnis Tionghoa, yakni model: identitas dinamis; identitas nasional; identitas budaya; identitas sosial; identitas kelas; dan identitas multikultural, secara sinergi menghasilkan suatu formulasi identitas yang lebih pas bagi Indonesia di era globalisasi. Formulasi itu diusulkan dengan nama “identitas hibrid”, suatu formulasi yang menggambarkan keidentitasan Indonesia yang terus menjadi, identitas yang *fluid*, yang terbuka, yang dinamis yang membawa kepada identitas kebangsaan yang nonras, tidak rigid, tidak kaku, tidak tertutup, dan tidak statis terhadap perubahan, perkembangan, dan kebutuhan jaman. Identitas hibrid sebagai gagasan para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa, dipandang lebih pas dalam membangun keidentitasan di era global, namun tetap pada ruang ke-Indonesia-an. Formulasi identitas ini dilatarbelakangi oleh tuntutan dan harapan dari para tokoh dalam membangun keidentitasan Indonesia. Tuntutan tersebut merupakan kritik sekaligus upaya: (1) menghapus katagori mayoritas-minoritas yang secara politik telah melahirkan garis pemisah (*segregasi*); (2) menghapus berbagai penyakit budaya (*prasangka, stereotip, scape goating, rasisme, dan etnosentrisme*); (3) menghapus diskriminasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya; (4) membangun toleransi; (5) membangun sikap dan perilaku produktif; dan (6) menghapus politisasi etnis. Keenam tuntutan ini lahir dari suatu harapan, yakni: terwujudnya harmonisasi; Indonesia bersatu; tumbuhnya nilai-nilai budaya demokratis; Indonesia Baru (Indonesia yang terus menjadi); masyarakat multikultural yang sejahtera; dan keidentitasan bangsa berwawasan multi-budaya.

Secara keseluruhan gagasan dari para tokoh dalam merekonstruksi identitas bangsa dapat diringkas seperti pada tabel berikut:

Tokoh	Rekonstruksi Identitas Bangsa		
	Gagasan	Tuntutan	Harapan
1	Identitas Dinamis	Menghapus kategori	Harmonisasi

		mayoritas minoritas	
2	Identitas Nasional	Menghapus Berbagai Penyakit Budaya	Indonesia Bersatu
3	Identitas Budaya	Menghapus diskriminasi politik & budaya	Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi budaya
4	Identitas Sosial	Toleransi	Indonesia Menjadi
5	Identitas Kelas	Produktivitas	Masyarakat Multikultural Sejahtera
6	Identitas multikultural	Menghapus Politisasi Etnis	Identitas Bangsa Multi-Budaya

Perspektif pemikiran para tokoh etnis Tionghoa sebagaimana terangkum pada tabel di atas, menggambarkan faktualitas bahwa masalah identitas merupakan bagian penting dalam pemecahan 'masalah Tionghoa' di Indonesia. Namun demikian kepastian mengenai identitas Tionghoa sebagai bagian integral dalam identitas kebangsaan Indonesia, masih mencari format yang pas, dikarenakan konsep identitas itu sendiri ditentukan oleh konsep bangsa yang dalam konteks politik terus berkembang dan berubah.

Jika dilihat dari format negara Indonesia yang *indigenus nation* (negara suku) maka sudah selayaknya format yang pas adalah menempatkan etnis Tionghoa sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya.<sup>12</sup> Di jaman orde lama, Bung Karno pernah memunculkan ide bahwa orang Tionghoa adalah salah satu suku di Indonesia yang setara dengan suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan sebagainya. Dengan demikian orang Tionghoa telah menjadi orang Indonesia sejati tanpa asimilasi total. Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S PKI, ide tersebut kandas untuk diwujudkan.<sup>13</sup> Bahkan di era orde baru, orang Tionghoa harus melakukan asimilasi total dengan meleburkan identitas etnisnya ke dalam identitas etnis Indonesia.<sup>14</sup> Dari berbagai tekanan dan ketidakpastian tersebut, banyak orang Tionghoa berada di persimpangan jalan. Hal tersebut

<sup>12</sup> Suryadinata, L. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. (Jakarta: LP3ES, 1999).

<sup>13</sup> Suryadinata, L. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. (Jakarta: LP3ES, 1993).

<sup>14</sup> Susetyo, D.P.B. *Stereotip dan Relasi Antar Etnis Cina dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002).

tergambar dari temuan penelitian yang menunjukkan, bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Tionghoa di Indonesia.<sup>15</sup> Setidaknya ada empat orientasi yang ditemukan, yaitu: kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Tionghoa dan akan selalu menjadi etnis Tionghoa. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi diri, mereka selalu kembali ke asal usul dan warisan budaya etnis Tionghoa. Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis. Sedangkan kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis.

Demikian pula mengenai aspirasi dan partisipasi politik orang Tionghoa, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang, yaitu: kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa.<sup>16</sup> Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui *platform* persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika. Kelompok ketiga adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*. Kelompok keempat adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan, misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.

---

<sup>15</sup> Lihat makalah Lan, T. J. "Pengalaman Etnik Tionghoa dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia". Disampaikan dalam *Symposium Etnis Tionghoa sebagai Minoritas di Indonesia*. Tanggal 26 Oktober 1998. (Depok, 1998).

<sup>16</sup> Lihat artikel Tan, M.G. "Identitas Etnis Tionghoa Pasca Reformasi". Dalam *Majalah Tempo*. Edisi 14-22 Februari 1999.

Sedangkan kelompok kelima adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Tionghoa telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural.

### 3. Pembangunan Masyarakat Multikultural

Gagasan *integrated-pluralism* yang diusulkan sebagai alternatif kebijakan yang mengusung *recognition and difference* membuka peluang berfungsinya identitas hibrid, keidentitasan Indonesia yang terus menjadi. Hubungan fungsional dari dua tema ini, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan masyarakat multikultural pasca-reformasi di Kota Medan.

Penciptaan kondisi yang kondusif dalam membangun masyarakat multikultural, merupakan faktualitas berfungsinya kedudukan dan peran dari para tokoh etnis Tionghoa sebagai warga negara dalam membangun masyarakat multikultural yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan, upaya membangun masyarakat multikultural oleh para tokoh etnis Tionghoa dilakukan melalui cara partisipatif.

*Pertama*, dalam konteks keruangan. Sebelum reformasi mereka terdogma pada ruang stagnan (ekonomi), kini mereka memiliki kebebasan dalam memilih ruang. Ruang-ruang sosial baru mereka apresiasi karena ada penghargaan terhadap identitas yang berbeda. Masing-masing tokoh dengan latar belakang pekerjaan dan kompetensinya, telah memilih jalur yang dianggap pas bagi dirinya sebagai wadah dalam upaya membangun masyarakat multikultural. Melalui kedudukan yang dimiliki, para tokoh etnis Tionghoa, telah menunjukkan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam membangun masyarakat multikultural melalui ruang-ruang yang berbeda. Tokoh pertama berbasis di pendidikan, tokoh kedua di bidang organisasi dan politik, tokoh ketiga dominan di perhimpunan, tokoh keempat di bidang politik, tokoh kelima di bidang ekonomi, dan tokoh keenam pada dunia pers dan LSM.

Satu hal yang menarik untuk kasus kota Medan adalah gairahnya tokoh-tokoh etnis Tionghoa dalam memasuki kancah politik. Hal ini ada beberapa alasan: (1) mungkin sebagian dari kawan-kawan ingin menjadikan pengabdian mereka terhadap Indonesia semakin sempurna, dengan mengintegrasikan pengabdian sosial ekonomi yang telah dicapainya selama ini dengan pengabdian politik, melalui politik formal. Ini sebagai bentuk partisipasi politik yang konkrit karena selama puluhan tahun hak-hak politik kami dipasung oleh negara; (2) terkait dengan kegelisahan sejumlah etnis Tionghoa yang sudah sukses secara ekonomi, namun masih banyak ketimpangan sosial dan kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang terjun ke dunia organisasi non politik. Bersama-sama dengan rakyat kecil berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagian lagi memilih untuk terjun ke politik praktis dengan bergabung ke partai politik. Tokoh-tokoh ini percaya bahwa di era reformasi saat ini, dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membuat atau merevisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan belum adil; dan (3) dilihat secara statistik jumlah masyarakat etnis Tionghoa dewasa ini cukup signifikan baik di tingkat Sumut maupun di Medan. Dari 12,8 juta penduduk Sumut, sekitar 1,04 juta di antaranya adalah etnis Tionghoa. Sementara dari sekitar 2,1 juta penduduk kota Medan, sekitar 500.000 orang atau 25 persennya merupakan etnis Tionghoa. Data ini menunjukkan dari segi jumlah cukup signifikan dan wajar bila masyarakat Tionghoa memiliki wakil mereka di lembaga legislatif.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan adanya kegairahan berpolitik dari etnis Tionghoa di Sumut, khususnya di kota Medan yang pada tahun-tahun belakangan ini dinilai semakin meningkat terutama pada pemilu legislatif 2009 lalu. Fenomena ini harus dipandang positif sebagai bentuk konkrit partisipasi politik etnis Tionghoa di kota Medan untuk turut membangun Medan secara bersama. Satu hal juga yang menjadi catatan, kebijakan negara ternyata sangat berpengaruh terhadap peran mereka pada suatu ruang. Kalau dulu, etnis Tionghoa dibatasi pada ruang ekonomi, namun kini muncul fenomena menarik mereka sudah berani masuk pada ruang-ruang publik. Bahkan ruang politik, yang dulu dianggap paling tabu untuk didekati. Data ini, menunjukkan adanya



pergeseran dari ruang yang stagnan (ekonomi) ke arah terbukanya ruang-ruang sosial yang baru, atau terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dengan memberi ruang yang lebih luas bagi publik untuk berpartisipasi.

*Kedua*, dalam konteks budaya politik. Peran partisipatif dari para tokoh etnis Tionghoa dalam memasuki ruang-ruang publik, bahkan tampil sebagai ikon dan figur politik, menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi politik yakni dari *subyek political culture* menuju *participant political culture*, yakni budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi.<sup>17</sup> Mereka tampil sebagai warga negara yang aktif, memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai warga negara, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dan berperan sebagai aktivis dalam kehidupan masyarakat.

Peran dari para tokoh berkenaan dengan upaya pembangunan masyarakat multikultural, ditampilkan dengan mengambil kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial dan perubahan. Melalui *social comparison* dan *social learning*, mereka kembangkan *civic competence* dalam membangun masyarakat kota multikultural yang demokratis.<sup>18</sup>

Tinjauan analisis di atas, menunjukkan bahwa profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi lebel demokrasi dijadikan sebagai budaya politik masyarakat multikultural,<sup>19</sup> sekaligus mengindikasikan tumbuhnya multikulturalisme di kota Medan.

*Ketiga*, dalam konteks *togetherness*. Tumbuhnya keinginan untuk harmonisasi kehidupan bersama pasca-reformasi, oleh para tokoh etnis Tionghoa dinyatakan melalui spirit reformasi yang menginginkan terbentuknya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, masyarakat madani, tegaknya hukum

---

<sup>17</sup> Almond, G. dan Verba, S. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. (Boston: Little, Brown & Co. 1963).

<sup>18</sup> Branson, Margaret S. *Belajar Civic Education dari Amerika*. (Yogyakarta: LKIS dan TAF. 1999), hal. 8.

<sup>19</sup> Ata Ujan, Andre, "Membangun Kepentingan Bersama dalam Masyarakat Majemuk", *Jurnal Respons*, Vol 10, No 02, Desember 2004: hal. 79-44

dan HAM, terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial, terciptanya rasa aman, terjaminnya kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Hasil reformasi ini mengharapkan bahwa masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk (*plural society*) yang berisikan potensi kekuatan primordial yang otoriter-militeristik selama ini, harus digeser menjadi ideologi keanekaragaman kebudayaan atau ideologi multikultural. Dengan demikian, *togetherness* yang dimunculkan menunjukkan terjadinya pergeseran dari kehidupan *cultural pluralism* ke tahap *multiculturalism* yang dalam penataannya masih memerlukan waktu dan suasana yang lebih kondusif.<sup>20</sup>

#### D. Penutup

Profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini, dengan *civic competence* yang dimilikinya, mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi indikasi tumbuhnya masyarakat multikultural demokratis yang kondusif bagi kota Medan. Indikasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota, untuk mengkongkritisasi ide multikulturalisme, sekaligus untuk dicari peluang dan tantangannya bagi pembangunan masyarakat multikultural.

Bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, konsep masyarakat multikultural bukan hanya sekedar wacana. Tetapi, konsep ini adalah sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi terbangunnya masyarakat multikultural yang demokratis dan sejahtera. Sumbangan pemikiran para tokoh etnis Tionghoa berkenaan dengan rekonseptualisasi integrasi dan rekonstruksi identitas bangsa perlu dikomunikasikan dengan para tokoh etnis lain di kota Medan, pakar akademisi dan juga para pengambil keputusan sebagai masukan untuk menghasilkan

---

<sup>20</sup> Pelly, Usman. "Murid Pri dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru Di Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Multikultural". Dalam *Jurnal Antropologi Sosial* Thal. XXVII, NO. 71 Mei-Agustus 2003. Hal. 42.

model masyarakat multikultural dan kebijakan multikultural yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. "Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan". dalam *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, Vol. II, No. 1, April 2006, hal. 5
- Almond, G. dan Verba, S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown & Co.
- Ata Ujan, Andre. 1982 "Membangun Kepentingan Bersama dalam Masyarakat Majemuk", *Jurnal Respons*, Vol 10, No 02, Desember 2004: 79-44
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
- Besar, A. 1994. "Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi". Disampaikan dalam *Seminar Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi*. Tanggal 16-17 November 1994. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduce to Theory and Methods*. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon. hal. 27
- Branson, M.S. 1999. "Dasar-dasar Civic Education," dalam Margaret S. Branson, et.al. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Terj. Syafruddin, M. Nasir Alimi, dan M. Nur Khoiron. Yogyakarta: LKiS, pp. 1-88.
- Habib, A. 2006. "Dinamika Hubungan Etnis Tionghoa dengan Jawa". Disampaikan dalam *Seminar Sinologi*. Tanggal 13-14 Maret 2006. Malang: Lembaga Kebudayaan UMM.
- Lan, T. J. 1998. *Pengalaman Etnik Tionghoa dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah Simposium Etnis Tionghoa sebagai Minoritas di Indonesia. Tanggal 26 Oktober 1998. Depok.
- Lincoln, Y.S dan Guba, E.G. 1985. *Naturalistik Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marger, M.N. 1985. *Race and Ethnic Relation (American and Global Perspektif)* Belmomont, California: Wadworth Inc.,
- Miles, M. B dan Huberman, A. M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UNI Press.
- Neuman, W. L. 1997. *Social Reserch Methods Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn Bacon.
- Suryadinata, L. 1993. *Cina Perantauan*. Majalah Mingguan Tempo. No. 39, Th. XXIII, 27 November 1993.
- , 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Susetyo. 2002 *Stereotip dan Relasi Antar Etnis Cina dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Strauss, A dan Corbin, J. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritis Data*. Terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tan, M.G. 1999. *Identitas Etnis Tionghoa Pasca Reformasi*. dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.
- Pelly, Usman. 2003. "Murid Pri dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru Di Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Multikultural". Dalam *Jurnal Antropologi Sosial* Th. XXVII, NO. 71 Mei-Agustus 2003. Hal. 42
- Usman, S. 1995. "Integrasi dan Ketahanan Nasional Indonesia. Dalam Ichlasul Amal dan Armaidy Armawi, *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

